

Sumber: Jawa Pos, 9 April 2009.

Refleksi Pemilu 2009: Selamat berpesta Demokrasi

Oleh : Masdar Hilmy *

Hari ini Indonesia memilih. Setiap warga pemilih pergi berbondong-bondong ke bilik suara untuk mencontreng. Mereka menggantungkan asa kepada para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif untuk lima tahun ke depan. Sejenak kita lupakan hiruk-pikuk kehidupan, berpaling dari berbagai macam kepenatan guna merayakan datangnya hajat politik lima tahunan itu.

Kita -secara salah kaprah- sering menyebut pemilu sebagai “pesta demokrasi” hanya karena setiap warga diberi kebebasan untuk menentukan pilihan secara demokratis. Menurut saya, analogi tersebut tidak terlalu tepat untuk menggambarkan sakralitas pemilu yang seharusnya dilaksanakan dengan segala kekhusyukan dan kekhidmatan. Tujuan pemilu untuk memperbaiki kualitas hidup bangsa di segala lini terlalu mulia untuk sekadar dipersandingkan dengan sebuah pesta.

Memang layak nya sebuah pesta, perhatian kita sering disibukkan oleh aspek remeh-temeh yang bersifat aksesori-seremonial belaka. Mayoritas warga biasanya lebih tertarik kepada gegap gempita pesta dimaksud, sembari melupakan aspek teleologisnya. Pada saat seperti ini, kita cenderung asyik masyuk dalam ekstasi gemerlap pesta, sembari abai terhadap refleksi eksistensial pemilu bagi perbaikan kualitas hidup bangsa ke depan.

Tetapi, itulah pesta. Para pengunjung sering tidak diberi banyak pilihan, kecuali “dipaksa” menikmati suguhan acara dan hidangan yang telah dirancang event organizer. Pengunjung sering menjadi objek kekakuan protokoler, mulai tata cara berpakaian, beramah-tamah, hingga ekspresi raut muka.

Demi memenuhi aturan protokoler itu, pengunjung sering harus pandai berbasa-basi. Di panggung pesta setiap pengunjung harus pandai bersandiwara demi menyenangkan pengunjung lain. Ekspresi kepribadian otentik sering disembunyikan, diganti dengan kepalsuan-kepalsuan

Segera setelah pesta, suasana pun kembali sunyi, sepi, dan tanpa bekas. Semua bergegas ke tempat dan kesibukan masing-masing, melepas segala macam atribut pesta yang palsu. Berakhirnya ingar-bingar pesta menandakan berakhirnya kepalsuan, sekaligus kembalinya keaslian. Di sinilah episode

business as usual dimulai kembali. Setiap individu kembali ke “dunia nyata” bahwa segala macam kesulitan dan impitan hidup kembali mengakrabinya.

Kebermaknaan Pemilu

Lantas, apa makna analogi di atas bagi pemilu hari ini? Inilah sebuah refleksi yang sering absen dari benak kebanyakan orang ketika pemilu tiba. Pilihan kita seharusnya mencerminkan “deskripsi tebal” menyangkut kualitas demokrasi, bukan karena dorongan sesaat atas dasar pragmatisme, hedonisme, dan narsisme sempit. Adalah terlalu beresiko untuk menyandarkan kualitas demokrasi hanya kepada segelintir elite politik yang belum tentu memiliki integritas serta kapasitas menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Miskinnya pemaknaan pemilu persis terletak pada kenyataan belum berimbasnya pemilu bagi perbaikan kualitas hidup warga. Artinya, pemilu masih menjadi pesta rutin tanpa makna. Selebihnya, rakyat tetap menjadi objek politik-kekuasaan belaka, dibuai oleh janji-janji tidak realistis saat kampanye.

Karena itu, saat ini setiap warga layak menggugat kebermaknaan pemilu bagi perbaikan kualitas kehidupan bangsa secara menyeluruh. Setiap jengkal langkah dan hela nafas kita menuju bilik suara harus didasari atas kesadaran penuh untuk merangkai asa ke depan, bukan sekadar meramaikan pesta. Masih ada sisa waktu lima tahun ke depan yang jauh lebih bermakna untuk dikawal ketimbang sekadar menerima politik uang dari para caleg.

Gugatan yang sama pernah dilakukan sejumlah bangsa lain yang menganut asas demokrasi. Eric Selbin, misalnya, pernah menggugat kebermaknaan demokrasi bagi masyarakat Amerika Latin ketika pemilu tidak berbuah kesejahteraan warga masyarakat luas, melainkan hanya menguntungkan segelintir elite (Eric Selbin, *Modern Latin American Revolutions*, 1999). Kebermaknaan demokrasi juga pernah digugat di Rusia ketika pemilu hanya melanggengkan monopoli dan oligopoli ekonomi-politik kelompok tertentu (Grigory Yavlinsky, 1998).

Kualitas Demokrasi

Bukan rahasia lagi jika proses demokratisasi di negeri ini belum berkelindan dengan upaya perbaikan kualitas hidup warganya. Terbukti, Pemilu 2009 yang sangat mahal itu justru diselenggarakan di tengah berbagai persoalan yang mengimpit bangsa ini, seperti kemiskinan, pengangguran, dan

semacamnya. Hal itu terjadi karena demokrasi masih dipersepsi sebagai tujuan, bukan sarana untuk mencapai tujuan. Seharusnya, dengan demokrasi, berbagai persoalan bangsa dapat diurai dan diselesaikan secara damai, elegan, dan bermartabat.

Memang harus diakui, rendahnya kualitas demokrasi kita tidak hanya ditentukan kualitas para caleg dan politisi kita, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kinerja institusi dan infrastruktur demokrasi serta kualitas pilihan pemilih yang masih rendah. Kenyataannya, tidak semua warga pemilih mendasarkan pilihan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional jangka panjang untuk memperbaiki keadaan.

Kebanyakan pemilih kita memang bergerak semakin rasional, terutama dengan maraknya politik transaksional antara mereka dan para caleg. Tetapi, pergerakan mereka baru sebatas “rasionalitas minimal” dengan cara memilih caleg tertentu dengan imbalan “berjuang” (beras, baju dan uang). Mereka belum sampai pada tahap “rasionalitas maksimal”, yang partisipasi politik warga dalam pemilu didasari kesadaran penuh untuk memperbaiki kualitas hidup dan keadaban politik mereka. Artinya, pemilih dalam derajat tertentu justru turut mendegradasi kualitas demokrasi di negeri ini.

Inilah saat yang tepat untuk merestorasi kualitas demokrasi kita dengan cara memperbaiki berbagai kelemahan pemilu, mulai persoalan akuntabilitas proses penyelenggaraannya hingga peningkatan kualitas pilihan pemilih. Alih-alih, demokrasi akan kehilangan kepercayaan (trust) di kalangan penganutnya. Padahal, demokrasi prosedural diasumsikan berkorelasi positif terhadap peningkatan demokrasi substansial, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan warganya (Francisco L. Rivera-Batiz, 2002). Hanya pada kondisi semacam itulah pemilu bisa dikatakan sebagai sebuah “pesta rakyat”. Jangan ada dusta di antara kita. Selamat berpesta demokrasi!

Masdar Hilmy, MA PhD, pengajar Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, alumnus S-3 University of Melbourne, Australia

Sumber: Jawa Pos, 9 April 2009.